

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGEROYOKAN DAN ATAU PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA PADA  
SUPORTER SEPAKBOLA**

( Studi Kasus Putusan No. 174/PID.B/2011/PN. Lamongan )

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

Pancar Triwibowo  
NPM. 0871010109

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan  
DAN ATAU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN  
MENINGGAL DUNIA PADA SUPORTER SEPAK BOLA  
(Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan)**

Disusun Oleh :

**PANCAR TRIWIBOWO**  
NPM. 0871010109

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,  
Pembimbing Utama

**Yana Indawati, SH., M.Kn.**  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui  
DEKAN

**Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM.**  
NIP. 19620625 199103 1 001

## Surat Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pancar Triwibowo  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 19 Agustus 1989  
NPM : 0871010109  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Asrama Brimob Medaeng A2/11 Waru, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :  
“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan  
Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dikalangan Suporter Sepak  
Bola (Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN. Lamongan) dalam rangka  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil  
karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan  
hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka  
saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan saya  
(Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan  
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui  
Pembimbing

Surabaya, 25 Juli 2012  
Penulis,

Yana Indawati, SH.,M.Kn  
NPT. 3 7901 07 0224

Pancar Triwibowo  
NPM. 0871010109

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan dan atau  
Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia  
pada supporter sepak bola  
(Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan)

Oleh :

PANCAR TRIWIBOWO

NPM. 0871010109

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal : 08 Agustus 2012  
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

Yana Indawati, SH.,M.Kn  
NPT.3 7901 07 0224

1.

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM  
NIP.19620625 199103 1 001

2.

Subani, SH, M.Si  
NIP.19510504 198303 1 001

3.

Yana Indawati, SH.,M.Kn  
NPT.3 7901 07 0224

Mengetahui  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM  
NIP.19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan dan atau  
Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia  
pada Supoter Sepak Bola  
(Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan)

Oleh :

PANCAR TRIWIBOWO

NPM. 0871010109

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 30 Juli 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Yana Indawati, SH.,M.Kn  
NPT.3 7901 07 0224

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM  
NIP.19620625 199103 1 001

2.

Subani, SH., M.Si  
NIP.19510504 198303 1 001

3.

Yana Indawati, SH.,M.Kn  
NPT.3 7901 07 0224

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM  
NIP.19620625 199103 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepakbola (Studi Kasus Putusan No. 174/PID.B/2011/PN.Lamongan)”.

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang di fakultas hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Dan dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya dilapangan.

Mengingat dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, penulis menyampaikan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Drs. Gendut Sukarno, MS. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Subani, SH., M.Si. Selaku Kepala Progdil Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Fauzul Aliwarman, SHL., M.Hum. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, telah memberikan izin untuk melaksanakan ujian/sidang skripsi.
6. Yana Indawati, SH., M.Kn. Salaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa memberikan keteguhan hati waktu dan pikiran kepada penulis untuk segera mungkin menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh dosen maupun staf pegawai fakultas yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi.
8. Orang tua penulis yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
9. Kepada mahasiswa Fakultas Hukum UPN angkatan 2008 selaku teman-teman penulis yang telah memberikan keluangan waktu untuk bersedia membantu menyelesaikan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk menuangkan ide dan kemampuan dengan banyak berkonsultasi dan membaca literatur. Namun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan, oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan atau pada umumnya.

Surabaya, Agustus 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.5.1 Pengertian Hukum Pidana .....	7
1.5.2 Pengertian Tindak Pidana.....	8
1.5.3 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	12
1.5.4 Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan.....	13
1.5.5 Pengertian Teori – teori Pengambilan Putusan Pidana .....	15
1.5.6 Pengertian Visum Et Repertum .....	17
1.5.7 Pengertian Pertanggung Jawaban .....	18
1.5.8 Pengertian tentang Suporter .....	19
1.5.9 Faktor – faktor Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Massal (Pengeroyokan) .....	19
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	26
1.6.2 Sumber Data .....	26
1.6.3 Pengumpulan Data .....	28



1.6.4 Teknis Analisa Data.....	29
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	29
1.6.6 Lokasi Penelitian.....	31
<b>BAB II FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUPORTER SEPAKBOLA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN</b>	
2.1 Faktor – faktor yang Melatarbelakangi Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan.....	32
2.2 Analisa Faktor yang Mendominasi Dalam Pengaruh Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan.....	40
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGEROYOKAN DAN ATAU PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA</b>	
3.1 Gambaran Peristiwa Kasus Pengeroyokan dan atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Putusan no.174/PID.B/2011/PN.Lamongan.....	43
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Suporter Sepak Bola menurut Putusan No.174/PID.B/2011/PN. Lamongan.....	44
3.3 Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana dengan Teori teori Hukum.....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Wawancara Yayasan Suporter Surabaya

Lampiran 2 : Surat Pengantar Research / Penelitian Pengadilan Negeri Lamongan

Lampiran 3 : Hasil Wawancara Yayasan Suporter Surabaya

Lampiran 4 : Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Lamongan

Lampiran 5 : Putusan Perkara Nomor : 174/Pid.B/2011/PN.Lamongan.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “ JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama : Pancar Triwibowo  
NPM : 0871010109  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Agustus 1989  
Program Studi : Strata 1 ( S1 )  
Judul Skripsi :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan  
Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola  
(Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan)

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui faktor – faktor yang memengaruhi suporter sepakbola melakukan tindak pidana pengeroyokan serta pertimbangan Hakim dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lamongan sebagai tempat penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang semata-mata memaparkan kasus penelitian. Spesifikasi penelitian ini adalah yuridis normative karena berpijak dari azas-azas hokum. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan, penganalisaan faktor – faktor pidana yang dilakukan tersebut adanya peran dari penjiwaan perilaku masing – masing pribadi individu yang tidak bisa mengontrol bagaimana cara yang tepat dalam bertindak menguasai perilakunya yang akhirnya terpancing dengan luapan emosi, rasa frustrasi yang menganggap adanya hambatan yang serius dari pencapaian tujuan yang dikehendaki, kelompok yang memposisikan bahwa perselisihannya yang terjadi tidak akan pernah pudar atau pun hilang sebelum adanya pembalasan yang berarti dari kelompoknya dan kontrol sosial oleh suporter yang melibatkan atas keberadaannya tersebut akan menghasilkan reputasi dari pribadi maupun kelompok / organisasinya. Penganalisaan pertimbangan hakim dalam putusan No.174/PID.B/2011/PN. Lamongan pertanggung jawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan suporter sepak bola : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggapan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari si terdakwa, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan. Penganalisaan putusan dari pertimbangan hakim, penulisan ini memberikan pencapaian dari putusan tersebut menggunakan teori pendekatan model cerita.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban, Pengeroyokan, Penganiayaan, Suporter Sepakbola, Korban

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dan dimanapun. Hal ini sejalan dengan bahwa sepakbola mempunyai penonton yang paling banyak dibanding dengan olahraga yang lain.

Namun dalam persepak bolaan di Negara Indonesia kerusuhan dalam dunia sepak bola yang disebabkan oleh ulah suporter terus terjadi. Begitu banyak korban yang jatuh semakin menambah buruk citra persepakbolaan Indonesia. Bentrokan antarpendingkungan kedua kesebelasan yang berlaga semakin sulit dihindarkan. Rentetan kejadian ini tentu mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil yang sangat besar, baik dari sisi suporter maupun masyarakat umum. Tidak sedikit pula suporter yang meregang nyawa akibat fanatisme. Peristiwa-peristiwa ini pun dapat memberi sedikit gambaran bahwa suporter sepakbola di Indonesia masih jauh dari kata matang.

Akhir – akhir ini sering terjadinya kasus perkara penganiayaan yang dilakukan dengan bersama – sama mengeroyok yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dari seseorang akibat perselisihan oleh

para suporter sepak bola di tiap daerah, yang mana hal ini masih belum adanya rasa kesadaran atas perdamaian dari kalangan suporter sepak bola. Bahwasannya perdamaian itu ajaran yang hakiki pada setiap insan manusia dalam menanggapi situasi kondisi yang sedang mengalami kesulitan menangani suatu permasalahan. Tensi panas yang selalu mengembara dari jiwa para suporter apabila mengetahui dan mendapati suporter lain yang dirasa tidak pernah membawa angin segar dari rasa dendam. Pihak kepolisian pun selalu dibuat pusing dari perlakuan tingkah laku para suporter apabila didalam pertandingan sepak bola dari tim yang didukungnya bila memperoleh hasil yang mengecewakan di pertandingan, tindakan anarkis pun terwujud dari suporter.

Tindak pidana pengeroyokan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di samping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman pasal 170 KUHP dan dapat disangkakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Seperti diketahui bahwa adanya pemberitaan dimedia informasi elektronik. Kasus pengeroyokan suporter disidangkan. Pengadilan Negeri (PN) Lamongan, Jawa Timur, memutus kasus bentrokan antar pendukung kesebelasan sepak bola pendukung tim persebaya yang lebih dikenal dengan sebutan bonek mania dan pendukung tim persela lamongan dengan sebutan LA mania

hingga menyebabkan satu korban jiwa, sebanyak enam pelaku masing-masing bernama 6 orang yang terdiri dari masing – masingnya, saudara Mashuri Mustajab Z. bin Masruri, Yudha Firdianto alias Plolong, Muhammad Kamil bin Lutfi Rachman, Mohammad Iwan bin Nuryanto, Akmad Farid bin Nur Achmadi serta saudara Amin Tohari bin H. Kabir

Korban yang meninggal dunia atas nama saudara Gilang Andika (Alm) dan saudara Teguh Santoso alias Karimbo suporter dari persela lamongan (LA mania).

Kronologis kejadian, Korban meninggal dunia saat terjadi pengeroyokan di kereta api kertajaya tujuan surabaya – jakarta, kedua korban dikeroyok dan dianiaya oleh ke 6 pelaku sampai meninggal dunia salah satunya, dan yang satu korban selamat dengan memberanikan diri melompat dari kereta demi untuk mempertahankan nyawa dari pengeroyokan oleh para pelaku.

Memahami masalah suporter di Indonesia seringkali tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dalam masyarakat. Sepakbola, tak hanya sebuah permainan serius, tetapi lebih jauh menampilkan sebuah sistem dan struktur masyarakat itu sendiri (Pierre Bourdieu). Dengan demikian, kekerasan para suporter bola mesti dibaca sebagai persoalan sistem masyarakat kita pula. Kasus tersebut merupakan sebagian contoh tindak pidana yang terjadi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekerasan yang melibatkan para suporter sepak bola dapat dikategorikan bagaikan budaya yang tidak akan hilang dan berakhir oleh waktu, hal demikian

memang sangat miris untuk didengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat umum, dampak yang dihasilkan dari anarkisnya para suporter menimbulkan banyak kerugian yang nyata, terjadi pengrusakan fasilitas umum dan ketidak nyamanan bila di jalanan bertemu dengan kerumunan suporter. Dari tingkah anarkis suporter ini siapa yang dapat memberi pertanggungjawaban secara penuh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan)”, ini dikarenakan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan para suporter dipersepakbolaan yang menjadi pembicaraan hangat masyarakat dan sangat jarang dibahas dalam skripsi mahasiswa.

## 1.2 Rumusan Masalah :

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi suporter sepak bola melakukan tindak pidana pengeroyokan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan. Pertanggung jawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak sia-sia dan tidak dilakukan seenaknya maka harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi suporter sepak bola melakukan tindak pidana pengeroyokan.
  - b. Mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan sumbangan pemikiran dalam menghadapi masalah yang sama bagi aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan.



- b. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan penelitian adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan ( literatur ) disamping literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pengeroyokan khususnya mengenai penanganan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

- c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pengeroyokan.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Pengertian Hukum Pidana

Nullum Delictum, nulla poena sine praevia lege poenali.

Kitab Undang – undang Hukum Pidana pasal 1 ayat (1) : “ Sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang – undang pidana yang mendahuluinya.”<sup>1</sup>

Sudarsono mengemukakan bahwa hukum pidana adalah pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan (sudarsono, 1991 : 102).<sup>2</sup>

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut ;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan ;

---

<sup>1</sup> L.J. van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta , h. 324

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka Publishier, Jakarta , h.216

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.<sup>3</sup>

Definisi lain hukum pidana Menurut Simons (Utrecht) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht 1937*, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut : “ Hukum pidana adalah kesemuanya perintah – perintah dan larangan – larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak menaatinya, kesemua aturan – aturan yang menentukan syarat – syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan – aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>4</sup>

#### 1.5.2 Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa” pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang – undangan lainnya, terhadap perbuatan manadiadakan tindakan penghukuman.<sup>5</sup>

Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda, ada

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 216

<sup>4</sup> Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta , h. 8.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta , h. 72-73

dua paham yang berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang tindak pidana, yaitu paham monisme dan paham dualisme.

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham monisme, yaitu diantaranya :

- a) J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”(1987:135)
- b) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (1981:50)
- c) H.J. van schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”(1955:87)
- d) Simons, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”(1999:127)
- e) Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan (2002 : 72).<sup>6</sup>

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 73

<sup>7</sup> Moeljatno, Op.Cit., h.69

Sedangkan aliran dualisme yang dikemukakan oleh sarjana hukum yaitu :

Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada lima yaitu :

- a) Kelakuan dan akibat ( = perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur yang melawan hukum yang obyektif
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif<sup>8</sup>

Unsur – unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit – tidaknya dari dua sudut pandang yakni, dari sudut teoritis dan dari sudut undang – undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang – undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal – pasal peraturan perundang – undangan yang ada.

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang b oleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan pada orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar – benar dipidana. Pengertian diancam pidana

---

<sup>8</sup> Ibid. h.63

merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.<sup>9</sup>

Menurut rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur – unsur, yakni :

- a) Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah – olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan moeljatno, karena kalimat diancam dengan pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.<sup>10</sup>

## 2. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang – undang.

Buku II KUHP memuat rumusan – rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku / perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Banyak unsur – unsur lain yang dicantumkan baik disekitar / mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, Op.cit. h.79

<sup>10</sup> Ibid, h.80

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana<sup>11</sup>

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran
2. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material.
3. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan
4. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Penggolongan..
5. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya
6. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus.
7. Delik Tunggal dan Delik Berganda.
8. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Ommissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa
9. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat.
10. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

### 1.5.3 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana terhadap tubuh merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 82

Didalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Berbagai ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh ( manusia ) terdapat dalam Bab XX dan XXI. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, yang meliputi :
  - a) Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP.
  - b) Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP.
  - c) Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP.
  - d) Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP.
  - e) Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP.
  - f) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP.
  - g) Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian diatur dalam pasal 358 KUHP.
2. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 360 KUHP. Tindak pidana tersebut secara populer dikenal dengan kualifikasi karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka.<sup>12</sup>

#### 1.5.4 Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama - sama melakukan

---

<sup>12</sup> Tongat, Hukum Pidana Materiil, Djambatan, Jakarta , h. 67



kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang – undangan yang termuat dalam pasal 170 KUHP yang berisi :

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
  1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
  3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- 2) Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
- 3) Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
- 4) Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah.

Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.

- 5) Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Bab V penyertaan dalam tindak pidana KUHP, pasal 55 yang berisi:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, sarana atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat – akibatnya.

#### 1.5.5 Pengertian Teori – teori Pengambilan Putusan Pidana

Pengambilan keputusan (decision making) merupakan proses berpikir dan perilaku yang menghasilkan suatu pilihan (Umstot, 1988 ; Matlin, 1989). Matlin membedakan pengambilan keputusan dengan penalaran (reasoning) dalam hal derajat kepastian situasinya. Penalaran merupakan pengujian terhadap informasi dan penarikan kesimpulan dalam situasi yang lebih pasti dibanding dengan pengambilan keputusan. Teori pengambilan putusan pidana, menurut Hastie menjelaskan bahwa pengambilan putusan perkara pidana yang dilakukan juri dan dapat diterapkan pada hakim di Indonesia dengan dilakukan beberapa perubahan. Proses pengambilan keputusan juri sebenarnya tidak berbeda dengan hakim, perbedaannya jika juri memutus terdakwa bersalah atau tidak

sedangkan hakim memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, kemudian memutuskan pembedaannya jika terdakwa bersalah, teori hastie membicarakan pengambilan keputusan terdakwa bersalah atau tidak.<sup>13</sup>

Pendekatan teori probabilitas dalam pengambilan keputusan perkara pidana didasari oleh teori probabilitas Bayesian “Dimensi dasar dari berpikir yang menyatakan bahwa, membuat keputusan adalah probabilitas subjektif yang artinya semua informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan akan dikonsepsi oleh individu sebagai kekuatan keyakinan”.<sup>14</sup>

Pendekatan aljabar dalam menggambarkan proses mental telah digunakan sejak adanya psikologi, seperti diterapkan dalam perubahan sikap, persepsi terhadap manusia, psikolinguistik, pembuatan keputusan dan masalah yang terkait dengan psikofisik (Anderson dalam berkowitz, 1978)<sup>15</sup>

Pendekatan model cerita dalam rangka memutuskan perbuatan pidana, hakim akan mengumpulkan informasi persidangan dari jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa maupun barang bukti. Cesper, dkk (dalam Hastie, 1993) mengembangkan model pendekatan cerita dengan menggunakan dasar teori pemrosesan

---

<sup>13</sup> Djamaludin Ancok, Dibalik Putusan Hakim, Srikandi, 2005, h. 57

<sup>14</sup> Ibid., h. 57

<sup>15</sup> Ibid., h. 61

informasi kognitif untuk menjelaskan proses hakim dalam menentukan perbuatan pidana.<sup>16</sup>

#### 1.5.6 Pengertian Visum Et Repertum

Pengertian Visum Et Repertum adalah berasal dari kata visual, yaitu melihat dan repertum yaitu melaporkan, berarti : “apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertulis dan tertuang dalam bagian “pemberitaan” (hasil pemeriksaan).<sup>17</sup>

Visum Et Repertum semata – mata hanya dibuat agar sesuatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukan bagi kepentingan peradilan. Adapun macam – macam Visum Et Repertum

1. Dilihat dari sifatnya
  - a) Visum Et Repertum yang dibuat lengkap sekaligus atau definitif lazimnya ditulis “visum et repertum”
  - b) Visum Et Repertum sementara, misalnya visum yang dibuat bagi korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka – lukanya akibat penganiayaan.
  - c) Visum Et Repertum lanjutan, misalnya bagi si korban yang luka tersebut (sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat dari luka – lukanya tersebut si korban kemudian dipindahkan ke rumah sakit atau dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia.
2. Dilihat dari hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli)
  - a) Visum et repertum tentang pemeriksaan luka (korban hidup)
  - b) Visum et repertum tentang pemeriksaan mayat (jenazah)

---

<sup>16</sup> Ibid., h. 64

<sup>17</sup> Tolib Setiady, Pokok – pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Alfabet, Bandung, h.39-40

- c) Visum et repertum tentang pemeriksaan bedah mayat (jenazah)
- d) Visum et repertum tentang penggalan mayat
- e) Visum et repertum di tempat kejadian perkara (TKP)
- f) Visum et repertum tentang pemeriksaan barang bukti (bukti\_ bukti) lain.<sup>18</sup>

### 1.5.7 Pengertian Pertanggungjawaban

Untuk memperjelas mengenai pengertian pertanggung jawaban pidana itu, baik kita lihat apa yang ditulis oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:

Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawaban pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.<sup>19</sup>

Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 syarat yaitu:<sup>20</sup>

1. Dapat meninsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya tidak dapat di pandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- a. Keadaan Jiwanya
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gage, Idiot, gila dan sebagainya)
  3. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
- b. Kemampuan Jiwanya :
  1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
  2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
  3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, h.42-44

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Cet I, Yogyakarta, 1988, h.105.

<sup>20</sup> Ibid. h 122.

### 1.5.8 Pengertian Suporter

Berdasarkan pemahaman, penonton dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yakni penonton yang hanya sekedar menikmati pertandingan sepakbola tanpa memihak atau mendukung salah satu tim sepakbola serta kelompok penonton yang mendukung dan memberikan semangat kepada tim sepakbola yang mereka dukung, kelompok penonton yang kedua ini disebut suporter.<sup>22</sup>

Soerjono Soekanto (1990), menjelaskan bahwa suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (spectator crowds). Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada spectator crowds adalah kerumunan penonton tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak terkendalikan. Sedangkan suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada adanya interaksi didalam kelompok itu sendiri, melainkan juga karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepakbola yang didukung dan dibelanya. Apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepakbola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal.<sup>23</sup>

### 1.5.9 Faktor – faktor Tindak Pidana yang Dilakukan secara Massal (pengeroyokan)

Dalam kasus-kasus perbuatan pidana yang dilakukan secara massal baik dengan massa yang terbentuk secara terorganisir dan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir, memiliki motif dan

---

<sup>21</sup> <http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html> 12.01 AM.

<sup>22</sup> Suroso, Dyan Evita Santi, dan Aditya Pramana, Ikatan Emosional Terhadap Tim Sepakbola dan Fanatisme Suporter Sepakbola, Jurnal Penelitian Psikologi 2010, Vol. 01, No. 01, 23-37 23, Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, h. 24

<sup>23</sup> Ibid, h. 24

maksud yang lebih kompleks. Motif dan maksud memiliki makna yang berbeda, “motif” hanya menjelaskan tentang latar belakang perbuatan yang dilakukan seseorang. Jadi sifatnya menjawab pertanyaan mengapa pelaku berbuat, sedangkan “maksud” bermakna menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatannya, jadi lebih menerangkan pada tujuan tertentu dari suatu perbuatan.

Menurut Romli Atmasasmita dengan melihat fenomena kejahatan, kekerasan khususnya dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan secara massal cukup banyak terkandung perbedaan dalam motif dan maksudnya. Selain itu, perbuatan pidana massal ini juga melahirkan bentuk-bentuk tindakan/perbuatan yang bervariasi dan kompleks sehingga sangat sulit untuk menentukan kuasa kejahatan.<sup>24</sup>

Jadi karena sulit dan kompleksnya penyebab/faktor yang melatarbelakangi suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, sehingga tidak ada yang mutlak atau dapat disamakan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain tentang hal-hal apa yang melatarbelakanginya. Dalam menentukan suatu klausa kejahatan hukum pidana dalam hal ini tidak dapat menyelesaikannya sendiri maka dibutuhkan ilmu-ilmu bantu yang relevan dalam hal ini dari segi kriminologi dan psikologi.

## 1. Segi Kriminologi

---

<sup>24</sup><http://images.wilystra2007.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SQVKTQoKCmwAAHmSHg81/KARTIKA-BAB%20II.doc?key=wilystra2007:journal:91&nmid=125490498>, 02 Juni 2012

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung dari titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisa teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisa terhadap masalah kejahatan, yaitu : pertama, yang disebut dengan titik pandang secara makro atau macrotheories, kedua yang disebut microtheories, dan ketiga yang disebut bridging theories. Macrotheories adalah teori – teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori- teori ini menitikberatkan epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan, sebagai contoh teori anomie, dan teori konflik. Sedangkan microtheories adalah teori – teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang – orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula kelompok orang atau orang – orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan. Teori menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis. Sebagai contoh teori kontrol sosial.

Pengertian “Teori Kontrol”/“Control Theory” menunjuk kepada setiap perpektif yang membahas ihwal



pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian “Teori Kontrol Sosial” atau “Social Control Theory” menunjuk kepada pembahasan dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain keluarga, pendidikan, kelompok dominan.<sup>25</sup> Pada dasarnya teori ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum/mengapa orang taat kepada hukum. Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik baik kalau masyarakat membuatnya begitu.

Berikut ini diuraikan secara singkat beberapa teori yang termasuk dalam teori kontrol social, yaitu Menurut Travis Hirschi terdapat 4 elemen ikatan sosial (social bond) dalam setiap masyarakat, yaitu:

- a. Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, dan apabila attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Attachment diartikan secara bebas dengan keterikatan, ikatan pertama yaitu keterikatan dengan

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992, h. 31

orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan dengan teman sebaya.

- b. Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Karena dengan komitmen akan mendapatkan manfaat bagi orang tersebut dikarenakan kegiatan yang diikutinya. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya.
- c. Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah apabila orang aktif disegala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut.
- d. Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut.<sup>26</sup>

## 2. Segi Psikologi Sosial

Definisi psikologi sosial dikemukakan oleh para ahli, salah satunya pendapat W.A. Gerungan, psikologi sosial ialah suatu ilmu yang mempelajari dan menyelidiki pengalaman dan tingkah laku individu manusia seperti yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi – situasi sosial.<sup>27</sup> Beberapa hal yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan sosial, yakni :

---

<sup>26</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo, 2001, h. 89- 91

<sup>27</sup> R. Soetarno, Psikologi Sosial, Yogyakarta, Kanisius, 1994, h. 11

Emosi menurut Myers (1996) membagi agresi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- a) Agresi rasa benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression)  
Jenis agresi yang pertama (Hostile Aggression) ini merupakan ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi, perilaku agresi ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri. Jadi, agresi sebagai agresi itu sendiri. Sering disebut juga agresi jenis panas. Akibat dari jenis agresi ini tidak dipikirkan oleh pelaku dan pelaku memang tidak peduli jika perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat yang didapat.
- b) Agresi sebagai sarana untuk mencapai tujuan (Instrumental Aggression)  
Jenis agresi tersebut dapat dikategorikan kedalam jenis agresi yang pertama yaitu Agresi Rasa Benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression) yang semata-mata dilakukan untuk melampiaskan emosi.<sup>28</sup>

Frustrasi adalah suatu keadaan dalam diri individu yang disebabkan tidak tercapainya kepuasan atau suatu tujuan akibat adanya halangan atau rintangan dalam usaha mencapai kepuasan atau tujuan tersebut.<sup>29</sup> Menurut Teori Frustrasi-Agresi Baru (Berkowitz, 1978-1989 dan Berkowitz & Le Page, 1967). “ Jika suatu hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan tidak dapat dimengerti alasannya maka akan timbullah Frustrasi, yang akan membuat seseorang menjadi agresif ”. Berkowitz mengatakan bahwa “frustrasi

---

<sup>28</sup> <http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/01/14/analisa-psikologi-sosial-dalam-kasus-pengeroyokan-hingga-tewas-terhadap-2-dua-orang-anggota-polres-kuningan/>, 21 Juni 2012

<sup>29</sup> Isbandi Rukminto, Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Grafindo, Jakarta, 1994, h. 165

menimbulkan kemarahan dan emosi marah, hal inilah yang dapat memicu agresi. Marah itu sendiri baru timbul jika sumber frustasi dinilai mempunyai alternatif perilaku lain dari pada perilaku yang menimbulkan frustrasi itu”. “Agresi beremosi benci tidak terjadi begitu saja (tiba-tiba), kemarahan memerlukan pancingan (cue) tertentu untuk dapat menjadi perilaku agresi yang nyata” (Berkowitz & Le Page, 1967). Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Myers pada teorinya tentang Agresi rasa benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression), maka hal itupun berlaku pula pada teori Berkowitz dan Le Page, bahwa frustrasi yang menimbulkan kemarahan dan emosi.<sup>30</sup>

Kelompok sosial adalah dalam setiap sosial terdapat sejumlah individu yang berkumpul dan saling berinteraksi, sehingga di dalam kelompok sosial terdapat situasi sosial. Dengan demikian, setiap individu akan tersentuh persepsi sosialnya yang merupakan titik tolak individu untuk bertindak laku terhadap sesamanya dalam situasi sosial. Teori Pengaruh Kelompok (Staub-1996). “Pengaruh Kelompok terhadap Perilaku Agresif, antara lain akan dapat menurunkan hambatan dari kendali moral.” Selain karena faktor ikut terpengaruh, juga karena ada perancuan

---

<sup>30</sup> Op.Cit., 21 Juni 2012

tanggung jawab (tidak merasa ikut bertanggung jawab karena dikerjakan beramai-ramai), ada desakan kelompok dan identitas kelompok (kalau tidak ikut akan dianggap bukan anggota kelompok) dan ada ‘deindividuasi’ (identitas sebagai individu tidak akan dikenal).<sup>31</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin – doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum.<sup>32</sup> Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>33</sup>

### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, perundang-undangan,

---

<sup>31</sup> Ibid., 21 juni 2012

<sup>32</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24

<sup>33</sup> Ibid, h. 105

catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan, yaitu :

- 1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana
- 2) Kitab undang – undang Hukum Acara Pidana

Bahan hukum primer selain peraturan perundang – undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan hakim, putusan hakim inilah yang biasa disebut dengan Law in action.<sup>35</sup>

- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari buku – buku literatur dan tulisan – tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang diperoleh dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder

---

<sup>34</sup> Ibid, h. 106

<sup>35</sup> Ibid, h. 48

yang beraal dari kamus, ensiklopedia, majalah, media, dan sebagainya.<sup>36</sup>

### 1.6.3 Pengumpula Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

#### 1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang langsung terjun ke lapangan tempat obyek yang akan penulis teliti.

##### a) Observasi atau Pengamatan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencacatan dengan sistematis dengan fenomena – fenomena dan masalah – masalah yang dihadapi.

---

<sup>36</sup> Ibid, h. 106

b) Interview atau Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan lain yang dikumpulkan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literature, perundang – undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>37</sup>

1.6.4 Teknis Analisa Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

---

<sup>37</sup> Ibid, h. 107



### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau skripsi ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, menjawab rumusan masalah pertama mengenai faktor –faktor yang dapat mempengaruhi seorang suporter melakukan tindak pidana pengeroyokan. Dalam bab kedua ini terdiri atas dua sub bab yakni pertama faktor – faktor yang melatar belakangi terhadap terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Sub bab kedua, analisa faktor yang dominan dalam pengaruh melakukan tindak pidana pengeroyokan. Dalam bab kedua ini terdiri atas dua sub sub bab yakni tentang faktor internal dan kedua faktor eksternal.

Bab III, menjawab rumusan masalah kedua mengenai Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan. Pertanggung jawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan

korban meninggal dunia Dalam Bab ketiga ini terdiri atas tiga sub bab yaitu pertama gambaran peristiwa kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia menurut putusan no.174/PID.B/2011/PN.Lamongan. Kedua mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia supoter sepakbola menurut Putusan No.174/PID.B/2011/PN. Lamongan. Dan ketiga mengenai analisa sub bab kedua terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pidana berdasar teori – teori hukum.

Bab IV merupakan bab penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

#### 1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Pengadilan Negeri Lamongan.